



RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat dan demi terwujudnya lingkungan yang bersih, aman, indah, dan sehat, diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak guna menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Daerah;
- b. bahwa persoalan sampah plastik menjadi permasalahan terhadap lingkungan yang memiliki sifat sulit terurai secara alami, sehingga diperlukan penanganan dan pengendalian sampah plastik secara komprehensif, terpadu, proporsional, efektif, dan efisien;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan mengurangi timbulan Sampah, maka perlu adanya pengaturan mengenai Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pembatasan Plastik Sekali Pakai, pendauran ulang Plastik Sekali Pakai dan pemanfaatan Plastik Sekali Pakai.
2. Plastik Sekali Pakai adalah segala bentuk material yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene, thermoplastik synthetic polymeric* yang digunakan sekali pakai.
3. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Pelaku Usaha adalah orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan industri dan/atau perdagangan berkedudukan domisili hukum di Kota Yogyakarta.
6. Pelaku Kegiatan adalah orang atau sekelompok orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menghasilkan sampah Plastik Sekali Pakai.
7. Pembatasan Plastik Sekali Pakai adalah upaya mengurangi timbulan sampah Plastik Sekali Pakai yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
8. Pendaauran Ulang Plastik Sekali Pakai adalah upaya memanfaatkan

sampah Plastik Sekali Pakai menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

9. Pemanfaatan Kembali Plastik Sekali Pakai adalah upaya mengguna ulang sampah Plastik Sekali Pakai sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah Plastik Sekali Pakai yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
10. Tim Pengurangan Timbulan Sampah Plastik adalah tim yang memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengurangan timbulan sampah Plastik Sekali Pakai.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam mengurangi Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. menekan laju timbulan Sampah yang berasal dari produk dan/atau kemasan Plastik Sekali Pakai;
- b. mencegah dampak pencemaran lingkungan hidup akibat dari produk dan/atau kemasan Plastik Sekali Pakai;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- d. meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Wali Kota berwenang melakukan Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
- (2) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan Pengurangan Timbulan Sampah Plastik

Sekali Pakai;

- b. menyusun perencanaan pelaksanaan Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap penggunaan plastik oleh masyarakat; dan
 - e. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan larangan dalam Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
- (3) Wali Kota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendelegasikan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB III

JENIS PLASTIK

Pasal 5

Jenis Plastik Sekali Pakai meliputi:

- a. kantong plastik;
- b. *styrofoam*;
- c. sedotan plastik;
- d. wadah makanan dan/atau minuman;
- e. alat makan sekali pakai; dan/atau
- f. kemasan dan/atau pembungkus plastik.

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai meliputi:
 - a. inventarisasi penggunaan Plastik Sekali Pakai; dan
 - b. penetapan sasaran Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
- (2) Perencanaan Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Inventarisasi Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Pasal 7

- (1) Inventarisasi penggunaan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jenis Plastik Sekali Pakai yang dimanfaatkan;
 - b. bentuk penggunaan Plastik Sekali Pakai;
 - c. jumlah penggunaan Plastik Sekali Pakai; dan
 - d. pengetahuan terhadap plastik yang ramah lingkungan.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan sasaran Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dalam melaksanakan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Penetapan Sasaran Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup menetapkan sasaran Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (2) Sasaran Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemetaan berdasarkan hasil inventarisasi penggunaan Plastik Sekali Pakai.
- (3) Hasil inventarisasi penggunaan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai data dalam pengawasan pelaksanaan Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

BAB V

PELAKSANAAN PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI
PAKAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Orang perorangan;
 - b. Pelaku Usaha; dan
 - c. Pelaku Kegiatan.

Bagian Kedua

Pembatasan Plastik Sekali Pakai

Pasal 10

- (1) Masyarakat wajib melakukan Pembatasan Plastik Sekali Pakai.
- (2) Pembatasan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. tidak menggunakan Plastik Sekali Pakai; dan
 - b. mengganti kemasan dengan produk pengganti.
- (3) Produk pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. kantong plastik diganti dengan:
 1. kantong plastik berbahan yang dapat terurai;
 2. tas belanja ramah lingkungan; dan
 3. wadah dan/atau kemasan berbahan non plastik berupa kardus, kertas, daun, dan sejenisnya;
 - b. styrofoam untuk wadah dan/atau kemasan makanan diganti dengan kemasan berbahan kertas;
 - c. sedotan plastik diganti dengan sedotan berbahan logam, kayu, kertas dan sejenisnya yang dapat digunakan secara berulang kali;
 - d. alat makan sekali pakai berbahan plastik diganti dengan alat makan berbahan metal, dan sejenisnya yang dapat digunakan secara berulang kali;
 - e. wadah makanan dan/atau minuman berbahan Plastik Sekali Pakai diganti dengan wadah makanan dan/atau minuman berbahan metal, dan sejenisnya yang dapat digunakan secara berulang kali; dan/atau
 - f. kemasan plastik diganti dengan plastik yang dapat terurai dan ramah lingkungan, kemasan kertas, bungkus daun dan sejenisnya.
- (4) Masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau

- b. teguran tertulis

Bagian Ketiga

Pendauran Ulang Plastik Sekali Pakai

Pasal 11

- (1) Masyarakat wajib melakukan Pendauran Ulang Plastik Sekali Pakai.
- (2) Pendauran Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pengumpulan;
 - b. pemilahan;
 - c. pencucian; dan
 - d. perubahan ukuran dan/atau perubahan bentuk.
- (3) Pendauran Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan penyediaan fasilitas penampungan.
- (4) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
 - a. terlindung dari air hujan dan panas;
 - b. menggunakan wadah tertutup;
 - c. terdapat penanda identitas kegiatan; dan
 - d. tersedia papan edukasi mengenai Plastik Sekali Pakai.
- (5) Pendauran Ulang Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Kembali Plastik Sekali Pakai

Pasal 12

- (1) Masyarakat melakukan Pemanfaatan Kembali Plastik Sekali Pakai.
- (2) Pemanfaatan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggunakan plastik yang dapat diguna ulang tanpa melalui proses pengolahan.
- (3) Pemanfaatan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti prioritas sebagai berikut:
 - a. mengguna ulang Plastik Sekali Pakai seluruhnya dan/atau sebagian untuk fungsi yang sama; dan/atau
 - b. mengguna ulang Plastik Sekali Pakai seluruhnya dan/atau sebagian untuk fungsi yang berbeda.
- (4) Pemanfaatan Kembali Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga; dan/atau
 - b. pelaku usaha pengelolaan sampah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Masyarakat.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dapat membentuk Tim Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
- (3) Tim Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi; dan/atau
 - c. pelatihan/bimbingan teknis.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala.

Pasal 16

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. forum tatap muka;
 - b. menerbitkan buku panduan; dan/atau
 - c. membuat dan menyebarkan informasi melalui *website*, media sosial,

brosur, pamflet dan spanduk.

- (2) Bentuk sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. edukasi;
 - b. kampanye;
 - c. *workshop*;
 - d. seminar; dan/atau
 - e. diskusi publik.

Pasal 17

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Pembatasan Plastik Sekali Pakai;
 - b. pelaksanaan Pendaauran Ulang Plastik Sekali Pakai; dan/atau
 - c. pelaksanaan Pemanfaatan Kembali Plastik Sekali Pakai.

Pasal 18

- (1) Pelatihan/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan melalui forum tatap muka.
- (2) Bentuk pelatihan/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelatihan pendauran ulang Plastik Sekali Pakai; dan/atau
 - b. pelatihan pemanfaatan kembali Plastik Sekali Pakai.

Pasal 19

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan lapangan secara berkala dan/atau insidental berdasarkan pengaduan atau pelaporan dari masyarakat;
 - b. penyusunan dokumentasi sebagai bukti dukung;
 - c. penyusunan berita acara hasil pemantauan lapangan; dan
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (2) Pengawasan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk laporan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...